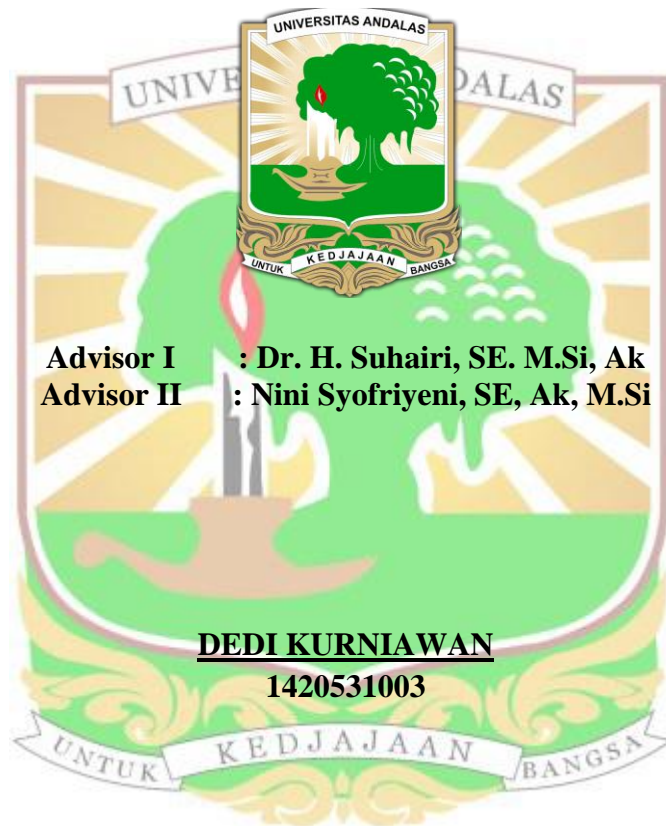


**ANALISIS PENERAPAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) DAN
INDIKATOR KINERJA DALAM MENERAPKAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA (ABK)DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

ABSTRAK

Dedi Kurniawan, (2017). Analisis Penerapan Standar Satuan Harga (SSH) Dan Indikator Kinerja Dalam Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

Pembimbing I : Dr. H. Suhairi, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Nini Syofriyeni, SE, Ak, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat penggunaan standar satuan harga dalam penganggaran, menganalisis seberapa besar kesesuaian indikator output pada program dan kegiatan, menganalisis seberapa besar kesesuaian indikator outcome pada program dan kegiatan, serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif mengenai penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dilihat dari penggunaan standar satuan harga dan kesesuaian indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran 2015 dan 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari metode wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 Kabupaten Sijunjung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum mempedomani standar satuan harga dalam proses penyusunan anggarannya dan untuk indikator kinerja yang digunakan dalam dokumen pelaksanaan anggarannya belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik sehingga penggunaannya dalam penyusunan anggaran belum dapat mengaitkan pengeluaran yang dilakukan dengan kinerja yang dihasilkannya. Dengan demikian, persyaratan mendasar dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja belum terpenuhi pada penyusunan APBD Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2015 dan 2016. Faktor-faktor yang menyebabkan belum berjalannya penganggaran berbasis kinerja adalah keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan data kinerja, dan keterbatasan dana.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan penganggaran serta membangun sistem pengumpulan data kinerja sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Standar Satuan Harga, Indikator Kinerja, Anggaran Berbasis Kinerja

ABSTRACT

Dedi Kurniawan, (2017). The Analysis of Price unit standart (PUS) And Performance Indicator in Applying Performance Based Budgeting (PBB) in the Governance of Sijunjung Regency

This research is aimed to acknowledge and analyse the influence of price unit standart to the budget, to analyse the confomity of output indicator on the program and activity, to analyse conformity of outcome indicator on the program and activity, and to analyse the factors that influence the application of performance based budgeting. This is a descriptive qualitative research. The application of performance based budgeting on the Sijunjung Regency can be seen from the utilization of price unit standart and conformity of performance indicator in the budgeting plan of 2015 and 2016. The data used in this research includes primary and secondary data, the primary data is obtained from the interview and the secondary data is obtained from the budgeting implementation document year 2015 and 2016 in Sijunjung Regency.

The result of the research shows that generally SKPD (Regency Performance Unit) has not implemented price unit standart as the guidance in arranging the budget and the performance indicator which is used in budget application document has not met the criteria of a good performance indicator, consequently its use in the preparation of the budget has not been able to associate the expenses incurred with the work performance. In other words, the basic requirement for application of performance based budgeting has not been fulfilled on APBD organisation of Sijunjung Regency on budgeting period 2015 and 2016. The factors that influence the slow progression of performance based budgeting is the limited number of human resources, the weakness on performance data, and budget limitation.

Sijunjung Governance Regency is recomended to increase the quality of human resources in planning and budgeting area and at the same time to build the performanceing data collection system in order to apply better application of performance based budgeting.

Key words: Price unit standart, performance indicator, performance based budgeting.